



**PENOLAKAN ITS BAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POSITIF  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ; STUDI PENETAPAN NOMOR 47/  
Pdt.P/ 2021/ PENGADILAN AGAMA TAIS, BENGKULU**

**HASIL PENELITIAN TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**NUR AFIFAH  
2520111004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**PENOLAKAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ; STUDI PENETAPAN  
NOMOR 47/ Pdt.P/ 2021/ PENGADILAN AGAMA TAIS, BENGKULU.**

*Nur Afifah, 2520111004, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,  
152 halaman, 2026, Pembimbing: Dr. Yasniwati, S.H., M.H., dan Dr. Devianty Fitri, S.H.,  
M.Hum.*

**ABSTRAK**

Praktik perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Indonesia masih banyak dilakukan, meskipun perkawinan itu sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait Kepastian Hukum dan Perlindungan hak-hak suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh karena itu di buat ketentuan Itsbat Nikah sebagai harmonisasi KHI Dan UU Perkawinan, dalam praktiknya, Permohonan Itsbat Nikah diajukan sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan dan legalitas hukum atas perkawinan yang tidak tercatat. Namun demikian, tidak seluruh Permohonan Itsbat Nikah dikabulkan oleh Pengadilan. Salah satu contohnya terdapat dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas, di mana Hakim menolak Permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan alasan para pemohon tidak memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya walaupun perkawinan para pemohon sudah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah satu bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak Permohonan Itsbat Nikah pada Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas dan kedua bagaimana penolakan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif kepastian hukum dan Masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Penetapan tersebut menolak Permohonan Itsbat Nikah karena dalam pertimbangannya hakim menilai para pemohon dianggap tidak menunjukkan itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama sejak awal perkawinan dilangsungkan dan alasan pemohon tidak bisa mencatatkan perkawinannya karna ada surat edaran larangan dilangsungkan pernikahan untuk memutus virus COVID-19 dan itu terbukti tidak benar. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan Masalah mursalah hukum hak-hak perempuan serta anak, penolakan tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak, terutama terhadap status hukum anak dan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memutus perkara itsbat nikah, semestinya hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek administrasi negara, tetapi juga harus memperhatikan aspek kepastian hukum Masalah mursalah, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak dari perkawinan yang tidak tercatat.

**Kata Kunci:** Itsbat Nikah, Pencatatan Perkawinan, Masalah Mursalah.

**REJECTION VALIDATION OF MARRIAGE BASED ON POSITIVE LAW AND  
THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI); A STUDY OF DECISION NO.  
47/Pdt.P/2021 OF THE TAIS RELIGIOUS COURT, BENGKULU.**

*Nur Afifah, 2520111004, Master of Law Program, Faculty of Law, Andalas University, 152  
pages, 2026, Advisors: Dr. Yasniwati, S.H., M.H., and Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.*

**ABSTRACT**

The practice of informal marriages or marriages that are not officially registered in Indonesia remains widespread, even though such marriages are valid because they meet the requirements and essential elements of marriage under Islamic law. This situation gives rise to various legal issues, particularly regarding legal certainty and the protection of the rights of the husband, wife, and children born of such marriages; therefore, the *Itsbat Nikah* provision was established to harmonize the Islamic Family Law (KHI) and the Marriage Law. In practice, an *Itsbat Nikah* petition is filed as an effort to obtain legal recognition and validity for an unregistered marriage. However, not all applications for *Itsbat Nikah* are granted by the court. One example is found in Decision No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas, in which the judge rejected the *Itsbat Nikah* petition on the grounds that the petitioners lacked good faith in registering their marriage, even though their marriage met the requirements for validity and the essential elements of marriage under Islamic law and applicable positive law. Based on this background, the issues under examination are, first, the judge's reasoning in rejecting the application for marriage validation in Ruling No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas, and second, how this rejection is assessed from the perspectives of legal certainty and *maslahah mursalah*. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. The results of the study indicate that the judge in the ruling rejected the petition for marriage validation because, in his reasoning, the judge determined that the petitioners had not demonstrated good faith in registering their marriage with the Office of Religious Affairs from the outset of the marriage, and that the petitioners' claim that they could not register their marriage due to a circular prohibiting weddings to curb the spread of COVID-19 and that this reason was proven to be untrue. However, when viewed from the perspective of legal certainty and the public interest (*maslahah mursalah*) regarding the legal rights of women and children, this rejection is deemed to potentially cause legal harm to the parties involved, particularly regarding the child's legal status and civil rights. Therefore, this study concludes that in adjudicating cases of marriage validation (*itsbat nikah*), judges should not only consider aspects of state administration but must also take into account the legal certainty of the public interest (*maslahah mursalah*), justice, and the protection of parties affected by unregistered marriages.

**Keywords:** *Itsbat Nikah*, Marriage Registration, *Maslahah Mursalah*.